

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B., Simon, H., Diniyati, D., & Widyaningsih, T. S. (2012). Persepsi Petani terhadap pengelolaan dan fungsi Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bumi Lestari*, 12(1), 123-136.
- Anomsari ET. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. *Jurnal Natapra*74.
- Anonim, 2007. Analisis Sosial Ekonomi Community Based Forest Management Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat, UNDIP, WWF, ICRAF, dan WATALA, Liwa.
- Arsyad, I dan S. Rahaijo. 2004. Pengelolaan Hutan Lestari: Pembelajaran dari Implementasi Manajemen Kolaboratif dalam Pengelolaan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dalam : Prosiding Workshop Penguatan Desentralisasi Sektor Kehutanan di Indonesia (ed.L. Siswanti et al.).
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), 2019. Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Kabupaten Luwu.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII 2015. Tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Center for International Forestry Research. (2003). Refleksi empat tahaun reformasi mengembangkan sosial forestri di era desentralisasi, Jakarta: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Chamdi, A.N., 2003. *Kajian Profil Sosial Ekonomi Usaha Kambing Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan*. Puslitbang Peternakan Departemen Pertanian. Bogor
- Cohen & Uphoff. 1990. *The Amaquity Of Participation. Third World Quarterly*.New York.

- Derby Paranoan, Samuel A.P, Syamsuddin M, 2012. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Studi Kasus, Program GN-RHL BP-DAS Saddang Kabupaten Tana Toraja). Makassar
- Diniyati D, Awang SA. 2010. Kebijakan Penentuan bentuk insentif pengembanaan hutan rakyat di wilayah gunung sawal Kabupaten Ciamis. Dengan metoda ahp. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(2): 129-143.
- (Ditjen Planologi) Direktorat Jendral Planologi, 2010. Profil Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Kawasan Hutan. Ditjen Planologi, Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Fauzi. A. 2009. Partisipasi Petani dalam pengelolaan Hutan Rakyat (Kasus di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah). Tesis Sekolah Pascasarjana IPB. Bogar.
- Gautama, I., 2007. Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Sistem Agroforestry Di Desa Lasiwala Kabupaten Sidrap. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*,2(3): Hal. 319-328. November 2007.
- Gunawan KS, Barkey RA, Hajar MAI. 2014. Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Desa Hutan. *E-Jurnal Digitalisasi Perpustakaan Pusat UNHAS*.
- Guniastuti D, Jusuf Y, Bulkis S. 2014. Peran Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kendal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal Digitalisasi Perpustakaan Pusat UNHAS*.
- Hairiah, K., Sardjono, M.A., & Sabarnurdin, S. (2003). Pengantar Agroforestri. (Bahan Ajar Agroforestry Centre (ICRAF).
- H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan : Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta : Rinika Cipta.
- lis Alviya. Suryandari EY Valuasi. 2006 : 1 – 13 (Vol. 3). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Sistem Agroforestri di Indonesia

- Irawan, A., Iwanuddin, Halawane, J. E., & Ekawati, S. (2017). Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan kawasan KPHP model poigar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14 (1), 71-82.
- Irwanto. (2007). Kajian Tumpang-sari di lahan kayuputih terhadap keberlanjutan Kegiatan Konservasi di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Tesis. IPB. Bogor
- Joko Triwanto, Syarifuddin A, Mutaqin T. 2012. Aplikasi Agroforestry di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
- Kartodiharjo, H., & Nugroho, B. (2016). Implementation of Hutan Tanaman Rakyat Policy in Muna District Southeast Sulawesi Province Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. *Jurnal Silviculture Tropika*, 7(3), 159-164
- (Kemenhut) Kementerian Kehutanan, 2011. Eksklusif Data Strategis Kehutanan 2011. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kurniatun Hairiah, Sunaryo, Widiyanto... Sistem Agroforestri di Indonesia
- Mahendra, F. (2009) Sistem Agroforestri dan Aplikasinya. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mayrowani, H., & Ashari. (2011). Pengembangan Agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 83-93.
- Manggala Rimbawati, D.E., Fatchiya, A., & Sugihen, B.G. (2018). Dinamika Kelompok Tani Hutan Agroforestry di Kabupaten..... 14(1), 92-103
- Mirnah A. 2019. *Analisis Keaktifan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Areal Hkm Bangkeng Bukit, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba*. *Journal of Forest Science Avicennia* Vol. 02 No. 01.

- Muis, H. 2007. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). (Kasus: di Kelurahan Layana dan Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Timur). IPB : Bogor.
- Nala Sari Tanjung, Sadono D, Wibowo CT. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat, 13 (2)
- Nandini R. 2013. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 10 (1) : 43-55
- Noordwijk, M. Van, Agus, F., Suprayogo, D., Hairiah, K., Pasya, G., Verbist, B., & Farida. (2004). Peranan Agroforestry dalam mempertahankan fungsi hidrologi daerah aliran sungai (DAS). *Agrivita*, 26(1), 1-8.
- Nugroho SS. 2011. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (Kajian Hukum Penguatan Kapasitas LMDH dan Peningkatan Efektivitas PHBM di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi), *Jurnal Sosial* 12 (2) : 94-107
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.l/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial. Jakarta
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/MENHUT-II/2007. Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Jakarta
- Rangkuti F, 2015. Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis . Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Reski, N. A., Yusran, Y., & Makkerennu, M. (2017). Rancangan Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(1), 37-43.
- Setyawan, A.D, 2010. Review: Biodiversity conservation strategy in a native perspective; case study of shifting cultivation at the Dayaks of Kalimantan. *Biocience* 2, pp. 95-108.

- Siti Irene Astuti D. 2009. Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: UNY
- Siti Irene Astuti. D., 2011 Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project.
- Suhirman, Alamsyah, Z., Zaini, A., Sulaiman, dan Nikoyan, A., 2012. Studi Perencanaan dan Penganggaran Bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara. Laporan Utama Sebagai Hasil Studi Lapangan. Kemitraan (Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia).
- Sumargo, W., Nanggara S.G., Nainggolan F.A., Apriani L., 2009. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009. Forest Watch Indonesia, Bogor.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suprayitno AR. 2008. *Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari*. Jurnal Penyuluhan 4 (2) : 135 – 138.
- , 2011. Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan Kemiri Rakyat (Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan). [disertasi]. Bogor (ID): IPB
- Syahrizal. Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dengan Pola Agroforestri di Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.
- Syaiful Bahri Z, Purwoko A, Martia T. Analisis Pengelolaan Agroforestri dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Masyarakat.
- Triwanto,J., 2000a. Seminar Sehari Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Himpunan Mahasiswa Jurusan Silva. Tidak diPublikasikan. Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Triwanto, J. (2011). Model Pengembangan agroforestry pada lahan marginal dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. *Humanity*, 7(1), 23-27.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta.

Waskito B. 2000. Hutan Rakyat: Studi Kemungkinan Pengembangan (Kasus di Desa Gunungsari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah). Di dalam: Suharjito D, editor. Hutan Rakyat diJawa . Bogor (IDI): Fakultas Kehutanan IPB.

Winata A, Yuliana E. 2012. Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *Jurnal Mimbar* 28 (1) : 65 - 76

Wilujeng E. 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Pelestarian hutan di KPH Bloro. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3 (1) : 1-10.

Wiyonoputri JO. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Podang Wilis Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Medium). *Jurnal Administrasi Publik* 2 (7) : Abstrak.

Yanto Rochmayanto, Frianto D, Nurrohman E..... Analisis Partisipasi Pada Program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Koto Panjang, Riau)

Yuliani, E.L., Djuhendi T., Yayan I., Dani W.M., 2006. Kehutanan Multi pihak. Langkah Menuju Perubahan. CIFOR, Bogor.

**KUESIONER**  
**“PARTISIPASI PETANI PADA PENGEMBANGAN AGROFORESTRY**  
**DI AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DESA KALADI**  
**DARUSSALAM KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU”**



Peneliti bernama Arsal Abdullah, merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Saat ini sedang melakukan penelitian dan melaksanakan proses penelitian sebagai salah satu syarat kelulusan studi. Peneliti berharap Bapak/Ibu unuk menjawab kuisisioner ini dengan jujur. Identitas dan jawaban dijamin kerahasiannya semata-mata hanya akan digunakan untuk kepentingan penulisan tesis. Terima kasih atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk menjawab kuesioner ini.

**Lampiran 1. Blanko Quisioner**

<b>IDENTITAS RESPONDEN</b>		
Nama		
No. HP		
Alamat		
Tempat/Tanggal Lahir		
Umur	tahun	
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	
Pendidikan terakhir	1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat Sekolah Dasar 3. Tamat SLTP/Sederajat	

	4. Tamat SLTA/Sederajat 5. Tamat Perguruan Tinggi	
Pendidikan non formal	1. Pernah mengikuti Kursus 2. Pernah mengikuti Pelatihan 3. Pernah mengikuti Penyuluhan	
Jumlah anggota keluarga	..... orang	
Status dalam Rumah Tangga	1. Kepala Rumah Tangga 2. Ibu Rumah Tangga 3. Anggota Rumah Tangga	
Status perkawinan	1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Janda/Duda	
Pekerjaan	1. Pokok 2. Sampingan	
Luas Lahan dikelola	1. Dalam Kawasan ..... Ha 2. Diluar Kawasan ..... Ha	
Penghasilan tetap	Rp.	
Penghasilan tambahan	Rp.	
Lama tinggal di Kampung	..... Tahun	

- Nilai Skor :** a. Manipulatif – Pasif = 1  
b. Konsultatif – Intensif materiil = 2  
c. Fungsional – Interaktif – Partisipasi inisiatif = 3

## I. PERENCANAAN HKm

### A. Dalam menyusun rencana kegiatan

1. Apakah bapak/ibu terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan?
  - a) Ikut mengusulkan penyusunan rencana kegiatan karena sadar akan manfaat dari kegiatan tersebut (3)
  - b) Hanya disuruh mendengar rencana kegiatan yang telah disusun oleh penyelenggara kegiatan dan diberi imbalan/biaya transportasi (2)
  - c) Tidak mengikuti/ sudah ada yang perwakilan dari anggota kelompok/warga setempat (1)

### B. Penentuan lokasi kegiatan

2. Bagaimana penentuan lokasi kegiatan ?
  - a) Diberikan lahan oleh pemerintah (1)
  - b) Menggunakan lahan sendiri untuk kegiatan (3)
  - c) Menyewa lahan untuk kegiatan (2)



### **C. Pengajuan rapat/pertemuan kelompok**

3. Apakah bapak/ibu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok tani?
  - a) Selalu mengadakan pertemuan kelompok tani (3)
  - b) Kadang-kadang mengikuti pertemuan kelompok tani (2)
  - c) Tidak pernah mengikuti pertemuan kelompok tani (1)

## **II. PELAKSANAAN HKm**

### **A. Pembentukan Kelompok**

1. Apakah bapak/ibu terlibat langsung dalam pembentukan kelompok tani?
  - a) Ya, bapak terlibat dalam pembentukan kelompok tani dan menentukan aturan-aturan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah (3)
  - b) Tidak, hanya diberitahu hasil keputusan dalam pembentukan kelompok tani (2)
  - c) Tidak terlibat dalam kegiatan ini (1)

### **B. Penyiapan lahan**

2. Apakah bapak/ibu mengikuti kegiatan survey lapangan ?
  - a) Lahan bapak diminta untuk lokasi kegiatan dengan mendapatkan imbalan material (1)
  - b) Memakai lahan milik bapak untuk pengelolaan hutan karena sadar akan penggunaan lahan tersebut (3)
  - c) Bapak diminta tanggapan atau masukan mengenai lahan yang dapat digunakan untuk lokasi kegiatan (2)

### **C. Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan**

3. Apakah bapak/ibu melakukan penanaman sendiri ?
  - a) Ya, melakukan sendiri (3)
  - b) Menyewa orang untuk penanaman (2)
  - c) Tidak melakukan kegiatan tersebut (1)
4. Bagaimana pemeliharaan yang dilakukan oleh bapak/ibu?
  - a) Rutin memeriksa/mengecek tanaman dilokasi (3)
  - b) Kadang-kadang memeriksa (2)
  - c) Tidak pernah memeriksa (1)
5. Pemanenan
  - a) Memanen sendiri (3)
  - b) Menyewa orang untuk memanen (2)
  - c) Tidak melakukan kegiatan tersebut (1)

## **III. PEMANFAATAN HASIL HKm**

1. Apakah bapak/ibu terlibat langsung dalam pemanfaatan hasil HKm?
  - a) Tidak terlibat, hanya memberi imbalan/biaya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut (2)
  - b) Hasil panen yang dihasilkan dimanfaatkan sendiri (3)
  - c) Tidak melaksanakan/tidak terlibat dalam kegiatan (1)

#### IV. MONITORING DAN EVALUASI

##### 1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan/ monitoring

- a) Bapak mengikuti perkembangan kegiatan proyek, karena mendapat imbalan (2)
- b) Bapak mengikuti perkembangan kegiatan proyek, karena sadar akan pentingnya kegiatan ini (3)
- c) Bapak tidak dilibatkan dalam kegiatan ini (1)

##### 2. Evaluasi

- a) Bapak dimintai tanggapan mengenai kegiatan dari awal, tetapi tanggapan bapak tidak diterima (2)
- b) Bapak diikutkan dalam menentukan keputusan mengenai hasil akhir kegiatan (3)
- c) Bapak tidak dilibatkan dalam kegiatan ini (1)
- d) Jawaban lain

#### V. Pemanfaatan Lahan setelah masuk program HKm.

1. Apakah Areal yang dikelola sebelum HKm sekarang menjadi areal HKm dengan luas : .....(Ha) atau bantuan,jelaskan.....
2. Tanaman yang dibudidayakan pada areal HKm ....., .....
3. Bantuan yang diterima melalui program HKm :
4. Pihak siapa saja yang memberikan bantuan program ?
5. Pola tanaman pengembangan agroforestry :
  1. Ruang .....
  2. Waktu .....
6. Berapa lama anda bekerja mengelolah areal HKm ?
7. Areal yang digarap merupakan milik pribadi/orang lain?
8. Berapa luas Areal yang bapak garap?
9. Berapa kali produksi/panen dalam setahun?
10. Berapa kilogram hasil produksi dalam satu kali panen?
11. Apakah bibit tanaman, obat-obatan, pupuk yang digunakan di sediakan oleh pemilik kebun atau disediakan oleh bapak?
12. Berapa harga bibit tanaman, pupuk,dan obat-obatan saat ini?
13. Bagaimana proses bagi hasil panen jika bibit, pupuk dan obat-obatan lainnya di sediakan oleh pemilik lahan/areal ?
14. Bagaimana proses bagi hasil panen jika bibit, pupuk dan obat-obatan lainnya di sediakan oleh anda dan pemilik hanya menunggu hasil?
15. Bagaimana pembayaran upah buruh pada saat proses pemanenan?
16. Apakah selama ini ada penyuluhan/pendampingan/pengawasan dari pemilik lahan/penyuluh?
17. Bagaimana proses persiapan pekerjaan pengawasan :
  - a. Persiapan lapangan dan jalan pemeriksaan
  - b. Pemasangan ajir, pembuatan lobang dan piringan
  - c. Pembuatan papan nama dan gubuk kerja

18. Bagaimana proses pengadaan bahan-bahan yang ada dilapangan berupa:
  - a. Pengadaan patok arah larikan dan ajir
  - b. Pengadaan pembuatan papan nama dan gubuk kerja
  - c. Pengadaan pupuk organik/kompos, anorganik/NPK Tablet dan obat-obatan/Herbisida
  - d. Pengadaan peralatan kerja
19. Jenis bibit yang disediakan untuk kegiatan agroforestry berupa :
  - a. Tanaman kayu-kayu : Akasia, Sengon, Jabon, Jati, Gamelina dll
  - b. Tanaman MPTS : Jambu Mete, Pete, Durian, Rambutan dll
20. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dari hasil berupa :
  - a. Pengendalian Mutu
  - b. Pengawasan Mutu kuantitas
  - c. Pengendalian Biaya
  - d. Distribusi alat dan bahan sesuai jadwal.
  - e. Pembuatan administrasi kegiatan (administrasi proyek)
21. Hal –hal apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam menggarap areal selama ini ?

**LAMPIRAN 2 : Tabel Tabulasi Data Identitas Responden Pada IUPHKm Sepakat Desa Kaladi Darussalam**

No.	N a m a	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jumlah Tanggungan Keluarga	Luas Lahan (Ha)	Penghasilan Per Tahun (Rp)	Lama Tinggal di Lokasi (Tahun)	Pekerjaan	Jabatan Dalam KTH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sukardi, S.AN	55	Sarjana	5	5	36,000,000	40	Kades	Ketua
2	Naris, S.Sos	43	Sarjana	3	2	20,400,000	43	Sekdes	Sekretaris
3	Mashuddin	50	SMA	4	2	16,500,000	40	Aparat Desa	Bendahara
4	Supardi	51	SD	2	15	250,000,000	23	Petani	Anggota
5	Firman	35	SMA	2	2	6,000,000	35	Petani	Anggota
6	Mardin	53	SMA	5	6	15,000,000	21	Petani	Anggota
7	Gaffar	42	SD	2	3	15,000,000	21	Petani	Anggota
8	Asse. S	41	SD	3	6	26,000,000	19	Petani	Anggota
9	Akis	40	SD	3	10	16,000,000	22	Petani	Anggota
10	Tamma	36	SD	3	2	8,500,000	25	Petani	Anggota
11	Sahri	41	SD	3	3	7,000,000	18	Petani	Anggota
12	Abu	27	SD	2	5	16,400,000	22	Petani	Anggota
13	Ami	31	SD	4	6	8,000,000	9	Petani	Anggota
14	Jasman	44	SD	5	5	15,000,000	20	Petani	Anggota
15	Suman	42	SD	3	3	4,000,000	1	Petani	Anggota
16	Lukman	37	SMA	3	4	12,000,000	10	Petani	Anggota
17	Asse Abu	51	SMA	4	4	18,000,000	27	Petani	Anggota
18	Sopian	30	SD	4	4	17,000,000	10	Petani	Anggota
19	Suardin	48	SD	6	3	5,000,000	12	Petani	Anggota
20	Rauf	30	SMP	5	4	14,000,000	23	Petani	Anggota
21	Yusdi	29	SMP	3	2	20,000,000	29	Petani	Anggota
22	M. Sakaria	44	SD	8	7	16,200,000	44	Petani	Anggota
23	Iswandi	24	SMA	6	4	15,600,000	24	Petani	Anggota
24	Masrullah	23	SMA	4	4	12,700,000	23	Petani	Anggota

25	Yunus	31	SMP	5	2	22,400,000	31	Petani	Anggota
26	Abdul Karim	36	SMP	5	2	19,500,000	36	Petani	Anggota
27	Nurdin	52	SMP	7	2	3,500,000	50	Petani	Anggota
28	Jumliha	43	SMA	9	1	14,000,000	43	Aparat Desa	Anggota
29	Abd. Muing	34	SMP	5	2	9,500,000	34	Petani	Anggota
30	Sampe	52	SMP	10	2	12,000,000	50	Petani	Anggota
31	Usman T	49	SMA	4	2	9,600,000	45	Petani	Anggota
32	Hodding	53	SMP	3	3	15,400,000	53	Petani	Anggota
33	Lias	30	SD	4	2	10,000,000	30	Petani	Anggota
34	Usman	38	SMA	3	2	18,000,000	38	Petani	Anggota

**Lampiran 3 : Tingkat Partisipasi IUPHKm Sepakat Desa Kaladi  
Darussalam Pada Tahap Perencanaan**

No.	Nama Responden	Tingkat Partisipasi Pada Perencanaan			$\Sigma$ Skor	Kategori Partisipasi
		Item Pertanyaan				
		1	2	3		
1	Lukman	1	1	2	1.3	Rendah
2	Rauf	1	1	1	1.0	Rendah
3	Yusdi	1	1	2	1.3	Rendah
4	Lias	1	1	2	1.3	Rendah
5	Naris, S.Sos	3	1	3	2.3	Sedang
6	Gaffar	1	3	1	1.7	Sedang
7	Sahri	2	3	3	2.7	Sedang
8	Abu	2	3	2	2.3	Sedang
9	Ami	1	2	2	1.7	Sedang
10	Suman	2	2	2	2.0	Sedang
11	Sopian	2	3	2	2.3	Sedang
12	Iswandi	1	3	1	1.7	Sedang
13	Masrullah	2	1	2	1.7	Sedang
14	Abdul Karim	2	3	2	2.3	Sedang
15	Nurdin	1	3	1	1.7	Sedang
16	Sampe	2	3	2	2.3	Sedang
17	Hodding	3	1	3	2.3	Sedang
18	Sukardi, S.AN	3	3	3	3.0	Tinggi
19	Mashuddin	3	3	3	3.0	Tinggi
20	Supardi	3	3	2	2.7	Tinggi
21	Firman	3	3	2	2.7	Tinggi
22	Mardin	3	3	3	3.0	Tinggi
23	Asse. S	3	3	3	3.0	Tinggi
24	Akis	3	3	2	2.7	Tinggi
25	Tamma	3	3	2	2.7	Tinggi
26	Jasman	3	2	3	2.7	Tinggi
27	Asse Abu	3	2	3	2.7	Tinggi
28	Suardin	3	2	3	2.7	Tinggi
29	M. Sakaria	3	3	3	3.0	Tinggi
30	Yunus	3	2	3	2.7	Tinggi
31	Jumliha	2	3	3	2.7	Tinggi
32	Abd. Muing	3	3	2	2.7	Tinggi
33	Usman T	3	3	3	3.0	Tinggi
34	Usman	2	3	3	2.7	Tinggi

#### Lampiran 4. Tabulasi & Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi Kegiatan Perencanaan

##### 4.a. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Luas Lahan

<b>Tingkat Partisipasi * Luas Lahan</b>					
Count					
		Luas Lahan			Total
		<4 Ha	4-6 Ha	>6 Ha	
Tingkat Partisipasi	Rendah	2	2	0	4
	Sedang	8	5	0	13
	Tinggi	9	5	3	17
Total		19	12	3	34

##### 4.a. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Luas Lahan

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.574 <sup>a</sup>	4	<b>.467</b>
Likelihood Ratio	4.713	4	.318
N of Valid Cases	34		
a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.			

##### 4.b. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Penghasilan

<b>Tingkat Partisipasi * Penghasilan/Tahun (Rp)</b>					
Count					
		Penghasilan/Tahun (Rp)			Total
		<9 juta	9-18 juta	>18 juta	
Tingkat Partisipasi	Rendah	0	3	1	4
	Sedang	4	7	2	13
	Tinggi	3	12	2	17
Total		7	22	5	34

**4.b. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Penghasilan**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.335 <sup>a</sup>	4	<b>.674</b>
Likelihood Ratio	3.041	4	.551
N of Valid Cases	34		

a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .59.

**4.c. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Pendidikan**

<b>Tingkat Partisipasi * Pendidikan Crosstabulation</b>					
Count					
		Pendidikan			Total
		SD-SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
Tingkat Partisipasi	Rendah	3	1	0	4
	Sedang	10	2	1	13
	Tinggi	9	7	1	17
Total		22	10	2	34

**4.c. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Pendidikan**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.733 <sup>a</sup>	4	<b>.603</b>
Likelihood Ratio	3.063	4	.547
N of Valid Cases	34		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24.



**4.d. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Jumlah Tanggungan Keluarga**

<b>Tingkat Partisipasi * Jumlah Tanggungan Keluarga Crosstabulation</b>					
Count					
		Jumlah Tanggungan Keluarga			Total
		1-4 orang	5-6 orang	> 6 orang	
Tingkat Partisipasi	Rendah	3	1	0	4
	Sedang	9	2	2	13
	Tinggi	9	7	1	17
Total		21	10	3	34

**4.d. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Jumlah Tanggungan Keluarga**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.295 <sup>a</sup>	4	<b>.510</b>
Likelihood Ratio	3.651	4	.455
N of Valid Cases	34		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.

**4.e. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Lamanya Tinggal**

<b>Tingkat Partisipasi * Lamanya Tinggal Crosstabulation</b>					
Count					
		Lamanya Tinggal			Total
		< 10 tahun	10-30 tahun	>30 tahun	
Tingkat Partisipasi	Rendah	0	4	0	4
	Sedang	2	6	5	13
	Tinggi	0	8	9	17
Total		2	18	14	34

**4.e. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Lamanya Tinggal**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.370 <sup>a</sup>	4	<b>.118</b>
Likelihood Ratio	9.244	4	.055
N of Valid Cases	34		
a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24.			

**4.f. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Umur**

<b>Tingkat Partisipasi * Umur Crosstabulation</b>					
Count					
		Umur			Total
		23-30 tahun	31-50 tahun	>50 tahun	
Tingkat Partisipasi	Rendah	3	1	0	4
	Sedang	4	6	3	13
	Tinggi	0	13	4	17
Total		7	20	7	34

**4.f. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Umur**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.873 <sup>a</sup>	4	<b>.012</b>
Likelihood Ratio	14.923	4	.005
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .82.			

**Lampiran 5 : Tingkat Partisipasi IUPHKm Sepakat Desa Kaladi Darussalam pada Tahap Pelaksanaan**

No.	Nama Responden	Tingkat Partisipasi Pada Tahap Pelaksanaan			$\Sigma$ Skor	Kategori Partisipasi
		Item Pertanyaan				
		1	2	3		
1	Gaffar	2	3	2.7	2.6	Rendah
2	Asse. S	2	3	1.7	2.2	Sedang
3	Sopian	1	1	3	1.7	Sedang
4	Iswandi	2	2	3	2.3	Sedang
5	Nurdin	1	3	3	2.3	Sedang
6	Hodding	3	1	2.3	2.1	Sedang
7	Usman	2	3	2.3	2.4	Sedang
8	Sukardi, S.AN	3	3	3	3.0	Tinggi
9	Naris, S.Sos	3	3	3	3.0	Tinggi
10	Mashuddin	3	3	2.7	2.9	Tinggi
11	Supardi	3	3	2	2.7	Tinggi
12	Firman	3	2	2.3	2.4	Tinggi
13	Mardin	3	3	2.7	2.9	Tinggi
14	Akis	2	3	2.7	2.6	Tinggi
15	Tamma	3	2	2.7	2.6	Tinggi
16	Sahri	2	3	3	2.7	Tinggi
17	Abu	2	3	3	2.7	Tinggi
18	Ami	2	3	3	2.7	Tinggi
19	Jasman	2	3	3	2.7	Tinggi
20	Suman	2	3	3		Tinggi

					2.7	
21	Lukman	2	3	3	2.7	Tinggi
22	Asse Abu	3	3	2.7	2.9	Tinggi
23	Suardin	3	3	3	3.0	Tinggi
24	Rauf	2	3	3	2.7	Tinggi
25	Yusdi	2	3	2.7	2.6	Tinggi
26	M. Sakaria	3	3	2.7	2.9	Tinggi
27	Masrullah	2	3	3	2.7	Tinggi
28	Yunus	3	2	2.7	2.6	Tinggi
29	Abdul Karim	3	3	2.3	2.8	Tinggi
30	Jumliha	2	3	3	2.7	Tinggi
31	Abd. Muing	2	3	2.6	2.5	Tinggi
32	Sampe	2	3	3	2.7	Tinggi
33	Usman T	3	3	1.7	2.6	Tinggi
34	Lias	3	3	2.3	2.8	Tinggi

**Lampiran 6. Tabulasi & Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi Kegiatan Pelaksanaan.**

**6.a. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Luas Lahan**

<b>Tingkat Partisipasi * Luas Lahan</b>					
Count					
		Luas Lahan			Total
		<4 Ha	4-6 Ha	>6 Ha	
Tingkat Partisipasi	Rendah	1	0	0	1
	Sedang	3	3	0	6
	Tinggi	15	9	3	27
Total		19	12	3	34

**6.a. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan terhadap Luas Lahan**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.914 <sup>a</sup>	4	<b>.752</b>
Likelihood Ratio	2.765	4	.598
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.			

**6.b. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Penghasilan**

<b>Tingkat Partisipasi * Penghasilan/Tahun (Rp)</b>					
Count					
		Penghasilan/Tahun (Rp)			Total
		<9 juta	9-18 juta	>18 juta	
Tingkat Partisipasi	Rendah	0	1	0	1
	Sedang	1	5	0	6
	Tinggi	6	16	5	27
Total		7	22	5	34

**6.b. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Penghasila**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.220 <sup>a</sup>	4	<b>.695</b>
Likelihood Ratio	3.386	4	.495
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .15.			

**6.c. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Pendidikan**

<b>Tingkat Partisipasi * Pendidikan Crosstabulation</b>					
Count					
		Pendidikan			Total
		SD-SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
Tingkat Partisipasi	Rendah	1	0	0	1
	Sedang	4	2	0	6
	Tinggi	17	8	2	27
Total		22	10	2	34

**6.c. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Pendidikan**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.053 <sup>a</sup>	4	<b>.902</b>
Likelihood Ratio	1.722	4	.787
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.			

**6.d. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Jumlah Tanggungan Keluarga**

<b>Tingkat Partisipasi * Jumlah Tanggungan Keluarga Crosstabulation</b>					
Count					
		Jumlah Tanggungan Keluarga			Total
		1-4 orang	5-6 orang	> 6 orang	
Tingkat Partisipasi	Rendah	1	0	0	1
	Sedang	4	1	1	6
	Tinggi	16	9	2	27
Total		21	10	3	34

**6.d. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Jumlah Tanggungan Keluarga**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.622 <sup>a</sup>	4	<b>.805</b>
Likelihood Ratio	1.939	4	.747
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .09.			

**6.e. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Lamanya Tinggal**

<b>Tingkat Partisipasi * Lamanya Tinggal Crosstabulation</b>					
Count					
		Lamanya Tinggal			Total
		< 10 tahun	10-30 tahun	>30 tahun	
Tingkat Partisipasi	Rendah	0	1	0	1
	Sedang	0	3	3	6
	Tinggi	2	14	11	27
Total		2	18	14	34

**6.e. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Lamanya Tinggal**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.479 <sup>a</sup>	4	<b>.830</b>
Likelihood Ratio	2.200	4	.699
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.			

**6.f. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Umur**

<b>Tingkat Partisipasi * Umur Crosstabulation</b>					
Count					
		Umur			Total
		23-30 tahun	31-50 tahun	>50 tahun	
Tingkat Partisipasi	Rendah	0	1	0	1
	Sedang	2	2	2	6
	Tinggi	5	17	5	27
Total		7	20	7	34

**6.f. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan terhadap Umur**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.501 <sup>a</sup>	4	<b>.645</b>
Likelihood Ratio	2.837	4	.585
N of Valid Cases	34		
a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21.			



**Lampiran 7 : Tingkat Partisipasi IUPHKm Sepakat Desa Kaladi  
Darussalam Pada Tahap Monitoring & Evaluasi**

No.	Nama Responden	Tingkat Partisipasi Pada Tahap Monitoring dan Evaluasi		$\Sigma$ Skor	Kategori Partisipasi
		Item Pertanyaan			
		1	2		
1	Gaffar	1	1	1.0	Rendah
2	Jasman	1	1	1.0	Rendah
3	Lukman	1	1	1.0	Rendah
4	Sopian	1	1	1.0	Rendah
5	Rauf	1	1	1.0	Rendah
6	Yusdi	1	1	1.0	Rendah
7	Iswandi	1	1	1.0	Rendah
8	Abdul Karim	1	1	1.0	Rendah
9	Nurdin	1	1	1.0	Rendah
10	Jumliha	1	1	1.0	Rendah
11	Abd. Muing	1	1	1.0	Rendah
12	Sampe	1	1	1.0	Rendah
13	Usman T	1	1	1.0	Rendah
14	Hodding	1	1	1.0	Rendah
15	Lias	1	1	1.0	Rendah
16	Usman	1	1	1.0	Rendah
17	Supardi	3	2	2.5	Sedang
18	Firman	3	1	2.0	Sedang
19	Akis	1	3	2.0	Sedang
20	Tamma	3	1	2.0	Sedang

21	Sahri	3	1	2.0	Sedang
22	Abu	3	1	2.0	Sedang
23	Ami	3	1	2.0	Sedang
24	Suman	3	1	2.0	Sedang
25	M. Sakaria	2	1	1.5	Sedang
26	Masrullah	2	2	2.0	Sedang
27	Yunus	1	2	1.5	Sedang
28	Sukardi, S.AN	3	3	3.0	Tinggi
29	Naris, S.Sos	3	3	3.0	Tinggi
30	Mashuddin	3	3	3.0	Tinggi
31	Mardin	3	3	3.0	Tinggi
32	Asse. S	3	2	2.5	Tinggi
33	Asse Abu	3	3	3.0	Tinggi
34	Suardin	2	3	2.5	Tinggi

**Lampiran 8. Tabulasi & Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MonEv) Terhadap :**

**8.a. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Luas Lahan**

<b>Tingkat Partisipasi * Luas Lahan</b>					
Count					
		Luas Lahan			Total
		<4 Ha	4-6 Ha	>6 Ha	
Tingkat Partisipasi	Rendah	11	5	0	16
	Sedang	5	3	3	11
	Tinggi	3	4	0	7
Total		19	12	3	34

**8.a. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Luas Lahan**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.395 <sup>a</sup>	4	<b>.078</b>
Likelihood Ratio	8.763	4	.067
N of Valid Cases	34		
a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .62.			

**8.b. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penghasilan**

<b>Tingkat Partisipasi * Penghasilan/Tahun (Rp)</b>					
Count					
		Penghasilan/Tahun (Rp)			Total
		<9 juta	9-18 juta	>18 juta	
Tingkat Partisipasi	Rendah	1	13	2	16
	Sedang	5	6	0	11
	Tinggi	1	3	3	7
Total		7	22	5	34

**8.b. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penghasilan**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.848 <sup>a</sup>	4	<b>.019</b>
Likelihood Ratio	11.970	4	.018
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.03.			

**8.c. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pendidikan**

<b>Tingkat Partisipasi * Pendidikan Crosstabulation</b>					
Count					
		Pendidikan			Total
		SD-SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
Tingkat Partisipasi	Rendah	11	5	0	16
	Sedang	9	2	0	11
	Tinggi	2	3	2	7
Total		22	10	2	34

**8.c. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Pendidikan**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.585 <sup>a</sup>	4	<b>.032</b>
Likelihood Ratio	9.551	4	.049
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.			

**8.d. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Jumlah Tanggungan Keluarga**

<b>Tingkat Partisipasi * Jumlah Tanggungan Keluarga</b>					
<b>Crosstabulation</b>					
Count					
		Jumlah Tanggungan Keluarga			Total
		1-4 orang	5-6 orang	> 6 orang	
Tingkat Partisipasi	Rendah	8	5	3	16
	Sedang	9	2	0	11
	Tinggi	4	3	0	7
Total		21	10	3	34

**8.d. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Terhadap Jumlah Tanggungan Keluarga**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.394 <sup>a</sup>	4	<b>.249</b>
Likelihood Ratio	6.522	4	.163
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .62.			

**8.e. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Lamanya Tinggal**

<b>Tingkat Partisipasi * Lamanya Tinggal Crosstabulation</b>					
Count					
		Lamanya Tinggal			Total
		< 10 tahun	10-30 tahun	>30 tahun	
Tingkat Partisipasi	Rendah	0	8	8	16
	Sedang	2	6	3	11
	Tinggi	0	4	3	7
Total		2	18	14	34

**8.e. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Lamanya Tinggal**

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.060 <sup>a</sup>	4	<b>.281</b>
Likelihood Ratio	5.443	4	.245
N of Valid Cases	34		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.

**8.f. Tabulasi Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi terhadap Umur**

<b>Tingkat Partisipasi * Umur Crosstabulation</b>					
Count					
		Umur			Total
		23-30 tahun	31-50 tahun	>50 tahun	
Tingkat Partisipasi	Rendah	5	8	3	16
	Sedang	2	8	1	11
	Tinggi	0	4	3	7
Total		7	20	7	34

**8.f. Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Terhadap Umur**

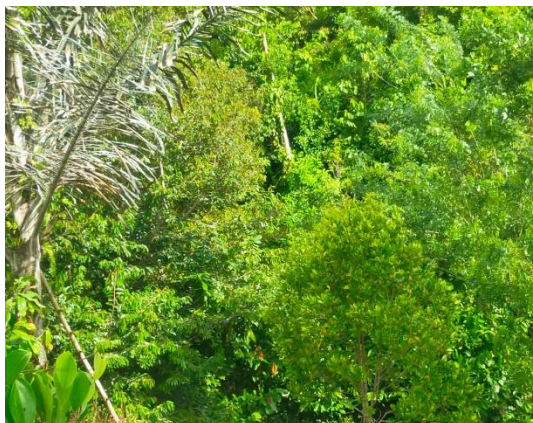
<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.351 <sup>a</sup>	4	<b>.253</b>
Likelihood Ratio	6.441	4	.169
N of Valid Cases	34		
a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.44.			

### Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara dengan Responden





## Lampiran 10. Dokumentasi Areal Perkebunan Kelompok HKm Sepakat





### Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan Proses Pembuatan Gula Semut di KTH Sepakat Desa Kaladi Darussalam



## Lampian 12. SK HKm KTH Sepakat



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.4017/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN SEPAKAT SELUAS ± 2.405 (DUA RIBU  
EMPAT RATUS LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI  
DESA KALADI DARUSSALAM KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN  
LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 05/HKM-DKD/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Ketua Kelompok Tani Hutan Sepakat mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas ± 3.115 (tiga ribu seratus lima belas) hektare pada kawasan Hutan Lindung di Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.18/X-4/BPSKL.2/VER/03/2019 tanggal 17 Maret 2019, terdapat pengurangan calon areal kerja seluas ± 126 (seraus dua puluh enam) hektare karena masuk di areal penggunaan lain (APL) dan ± 584 (lima ratus delapan puluh empat) hektare karena masuk pada blok inti KPHL Unit VIII Latimojong, sehingga calon areal kerja yang direkomendasikan menjadi seluas ± 2.405 (dua ribu empat ratus lima) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. bahwa calon areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b berada dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8559/MENLHK/PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) dapat diberikan izin pemanfaatan hutan selain untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan;
  - d. bahwa...



- 2 -

- d. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diterbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Sepakat seluas ± 2.405 (dua ribu empat ratus lima) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di di Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210); dan

7. Peraturan...

- 3 -

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN SEPAKAT SELUAS ± 2.405 (DUA RIBU EMPAT RATUS LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA KALADI DARUSSALAM KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Hutan Sepakat seluas ± 2.405 (dua ribu empat ratus lima) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) Kepala Keluarga terdiri dari laki laki sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) orang dan perempuan sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.
- KEDUA : Letak, luas dan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diwariskan;
  2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
  3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang dipindahtangankan;
  4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
  6. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
  7. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak melakukan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan hutan; dan
  8. Dilarang menanam sawit di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. Usaha...

- 4 -

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
  2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
  3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- KELIMA** : Terhadap areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang berada di dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dan di kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
- KEENAM** : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat Perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
  2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal;
  3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
  4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
  5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
  6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
  7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha hutan kemasyarakatan dan rencana kerja tahunan; dan
  8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
- KETUJUH** : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
  2. memberi tanda batas areal kerjanya;
  3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
  4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
  5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
  6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
  7. membayar provisi sumber daya hutan;
  8. mempertahankan fungsi hutan; dan
  9. melaksanakan perlindungan hutan.
- KEDELAPAN** : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KESEMBILAN** : Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktivitas dengan metode pembakaran.
- KESEPULUH:...



- 5 -

- KESEPULUH : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 APRIL 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.



BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

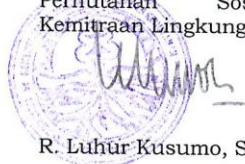
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bupati Kabupaten Luwu;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong;
18. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan; dan
19. Ketua Kelompok Tani Sepakat Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

- 5 -

- KESEPULUH : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Masyarakat melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 APRIL 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bupati Kabupaten Luwu;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong;
18. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan; dan
19. Ketua Kelompok Tani Sepakat Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.



- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN SEPAKAT SELUAS ± 2.405 (DUA RIBU EMPAT RATUS LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA KALADI DARUSSALAM KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN.

NOMOR : SK.4017/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019

TANGGAL : 23 APRIL 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN SEPAKAT PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA KALADI DARUSSALAM KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	SUKARDI,S.AN	L	7317193112660002	DS. KALADI DARUSSALAM
2	NARIS,S.Sos	L	7317190310770001	DS. KALADI DARUSSALAM
3	AMIL ASDAR	L	7317192504730001	DS. KALADI DARUSSALAM
4	MASHUDDIN	L	7317190312700003	DS. KALADI DARUSSALAM
5	HODDING	L	7317193112580013	DS. KALADI DARUSSALAM
6	NARI	P	7317197112700008	DS. KALADI DARUSSALAM
7	HARIATI	P	7317195712930003	DS. KALADI DARUSSALAM
8	SAMPE	L	7317193112690022	DS. KALADI DARUSSALAM
9	SYRIFUDDIN	L	7317193112720004	DS. KALADI DARUSSALAM
10	JARAK	L	7317193112400024	DS. KALADI DARUSSALAM
11	ABDULLAH	L	7317191002910002	DS. KALADI DARUSSALAM
12	HARYUDI	L	7317192111830001	DS. KALADI DARUSSALAM
13	FIRDING	L	7317191510740001	DS. KALADI DARUSSALAM
14	A.ARIS	L	7317192210870001	DS. KALADI DARUSSALAM
15	ARIFIN NUR	L	6402041512731002	DS. KALADI DARUSSALAM
16	JUMARDIN	L	7317191210770001	DS. KALADI DARUSSALAM
17	MASRI	L	7317190103860001	DS. KALADI DARUSSALAM
18	MUH. DAUD	L	7317193011790001	DS. KALADI DARUSSALAM
19	HALI	L	7317190602660001	DS. KALADI DARUSSALAM
20	AZIS IKHSAN	L	7317190612770002	DS. KALADI DARUSSALAM
21	IRMAYANTI	P	7317194404850001	DS. KALADI DARUSSALAM
22	SRI WAHYUNI	P	7317196001840002	DS. KALADI DARUSSALAM
23	USMAN B	L	7317193112720015	DS. KALADI DARUSSALAM
24	MARTANG	P	7317196708740001	DS. KALADI DARUSSALAM
25	ARAS	L	7317193112940004	DS. KALADI DARUSSALAM
26	NURDAYANTI NOVIANI	P	7317024109990002	DS. KALADI DARUSSALAM
27	A.ROSMI	P	7317196010840001	DS. KALADI DARUSSALAM
28	MUH. SUKRI	L	7317190707860002	DS. KALADI DARUSSALAM
29	KASRI ISMAIL	L	7317191801820001	DS. KALADI DARUSSALAM
30	HAMDIA	P	7317197112660004	DS. KALADI DARUSSALAM
31	CERO	P	7317197112410005	DS. KALADI DARUSSALAM
32	ABD.SAMAD	L	7317193112370003	DS. KALADI DARUSSALAM
33	SUMARNI	P	7317194207650001	DS. KALADI DARUSSALAM
34	HABERULLAH	L	7317193112450004	DS. KALADI DARUSSALAM
35	MARJANI	L	7317191504760001	DS. KALADI DARUSSALAM
36	HAIRUL SALEH	L	7317192411090087	DS. KALADI DARUSSALAM
37	BAKRI	L	7317192505750002	DS. KALADI DARUSSALAM
38	SODDING	L	7317190107550016	DS. KALADI DARUSSALAM

39. HARIANI...

- 7 -

39	HARIANI	P	7317194402950003	DS. KALADI DARUSSALAM
40	SABAN NUR	L	7317192910900001	DS. KALADI DARUSSALAM
41	FIRMAN	L	7317192008780001	DS. KALADI DARUSSALAM
42	ANDI FIRMAN	L	7317193112650016	DS. KALADI DARUSSALAM
43	SUHARNI	P	7317195909840001	DS. KALADI DARUSSALAM
44	LAMEKKA	L	7317193112570005	DS. KALADI DARUSSALAM
45	SUDIA	P	7317197112458004	DS. KALADI DARUSSALAM
46	JASMAN	L	7317193112770003	DS. KALADI DARUSSALAM
47	JUFRI	L	7317190204720001	DS. KALADI DARUSSALAM
48	ASSE	L	7317197112540009	DS. KALADI DARUSSALAM
49	SABARUDDIN	L	7317190103780001	DS. KALADI DARUSSALAM
50	LIAS	L	7317191102710001	DS. KALADI DARUSSALAM
51	JABARUDDIN	L	7317191702920002	DS. KALADI DARUSSALAM
52	SHINTA	P	7317197112850002	DS. KALADI DARUSSALAM
53	MURSALIM.B	L	7317031509720003	DS. KALADI DARUSSALAM
54	HAMSIR	L	7317192011960001	DS. KALADI DARUSSALAM
55	USMAN	L	7317191110890003	DS. KALADI DARUSSALAM
56	RAHMATIAH.R	P	7317195202830002	DS. KALADI DARUSSALAM
57	ROSMIATI	P	7317194703830001	DS. KALADI DARUSSALAM
58	MODDING	L	7317190610700001	DS. KALADI DARUSSALAM
59	RUSDI	L	7317191101940003	DS. KALADI DARUSSALAM
60	BANDOCI	L	7317193112540013	DS. KALADI DARUSSALAM
61	YUSDY	L	7317191508920002	DS. KALADI DARUSSALAM
62	HANIRA	P	7317195712870001	DS. KALADI DARUSSALAM
63	SAMSIA	P	7317195112620002	DS. KALADI DARUSSALAM
64	HASANUDDIN	L	7317191708860001	DS. KALADI DARUSSALAM
65	SUARDIN	L	7317190708730001	DS. KALADI DARUSSALAM
66	FIRMAN	L	7317193006860001	DS. KALADI DARUSSALAM
67	ISMAIL	L	7317193112660005	DS. KALADI DARUSSALAM
68	RAMLI	L	7317190706900004	DS. KALADI DARUSSALAM
69	LASMAN	L	7317192107890001	DS. KALADI DARUSSALAM
70	ABD. WAHID	L	7317191102650002	DS. KALADI DARUSSALAM
71	ST.SYARIFAH	P	7317195207840001	DS. KALADI DARUSSALAM
72	MASJADI	L	7317190307750001	DS. KALADI DARUSSALAM
73	NURDIN	L	7317190512690001	DS. KALADI DARUSSALAM
74	LASO CILA	L	7317193112620003	DS. KALADI DARUSSALAM
75	NASRUDDIN	L	7317191303740003	DS. KALADI DARUSSALAM
76	DIRMAN	L	7317192009550001	DS. KALADI DARUSSALAM
77	ST. NURBAYA	P	7317195111940004	DS. KALADI DARUSSALAM
78	YUNUS	L	7317193112900008	DS. KALADI DARUSSALAM
79	HASBUDI	L	7317191904840001	DS. KALADI DARUSSALAM
80	PAKARUDDIN	L	7317143112750044	DS. KALADI DARUSSALAM
81	MIRDAS	L	7317120105740001	DS. KALADI DARUSSALAM
82	ISMA'IL	L	7317192001780001	DS. KALADI DARUSSALAM
83	HASNAINI	P	7317197112660003	DS. KALADI DARUSSALAM
84	MAHMUDDIN	L	7317201309890001	DS. KALADI DARUSSALAM
85	AMIR	L	7317193101500001	DS. KALADI DARUSSALAM
86	SAMSUL	L	7317043112870006	DS. KALADI DARUSSALAM
87	ABD.RAUF	L	7317190108680002	DS. KALADI DARUSSALAM
88	AHMANUDDIN	L	7317191003720001	DS. KALADI DARUSSALAM
89	NAWIR	L	7317193112860009	DS. KALADI DARUSSALAM
90	M.SAKARIA	L	7317193107760002	DS. KALADI DARUSSALAM
91	ABD.KARIM	L	7317191304850001	DS. KALADI DARUSSALAM
92	ABD. RAHMAN	L	7317031006760002	DS. KALADI DARUSSALAM

93. MUHLIS...



- 8 -

93	MUHLIS	L	7317192705650001	DS. KALADI DARUSSALAM
94	HERMANTO	L	7317191507930003	DS. KALADI DARUSSALAM
95	MUNARIA	P	7317195110910001	DS. KALADI DARUSSALAM
96	NARUDDIN	L	7317193112800017	DS. KALADI DARUSSALAM
97	NIA	P	7317196012770001	DS. KALADI DARUSSALAM
98	SAHIDANG	L	7317193112100016	DS. KALADI DARUSSALAM
99	ARIS	L	7317190405810001	DS. KALADI DARUSSALAM
100	ARISMAN	L	7317190510710001	DS. KALADI DARUSSALAM
101	UDIK	L	7317192212800001	DS. KALADI DARUSSALAM
102	GAFFAR	L	7317190504830001	DS. KALADI DARUSSALAM
103	UNDING	L	7317193112870010	DS. KALADI DARUSSALAM
104	LASIRI	L	7317193112640016	DS. KALADI DARUSSALAM
105	MANSUR M	L	7317190507670001	DS. KALADI DARUSSALAM
106	NUSRIH	L	7317190407740001	DS. KALADI DARUSSALAM
107	SUDIRMAN	L	7317193112680017	DS. KALADI DARUSSALAM
108	JUMAING	L	7317190105860001	DS. KALADI DARUSSALAM
109	TAKIN	L	7317190107790006	DS. KALADI DARUSSALAM
110	RAHIM BIN SAMPO	L	7317191703730001	DS. KALADI DARUSSALAM
111	SUDI	L	7317191105800001	DS. KALADI DARUSSALAM
112	BAHAR.ABD.M	L	7317191304750001	DS. KALADI DARUSSALAM
113	DINDA	L	7317192101750001	DS. KALADI DARUSSALAM
114	ARDING	L	7317193112450026	DS. KALADI DARUSSALAM
115	NASIRE	L	7317194504810001	DS. KALADI DARUSSALAM
116	KAMAN	L	7317190103810001	DS. KALADI DARUSSALAM
117	HADONG	L	7317190106760001	DS. KALADI DARUSSALAM
118	RAMLI	L	7317192507800001	DS. KALADI DARUSSALAM
119	LEGA	L	7317193112470001	DS. KALADI DARUSSALAM
120	SAFRI	L	7317193112730018	DS. KALADI DARUSSALAM
121	SUPRI	L	7317190107870011	DS. KALADI DARUSSALAM
122	SAUDE	L	7317190107800029	DS. KALADI DARUSSALAM
123	SALDI	L	7317190107800027	DS. KALADI DARUSSALAM
124	RISAL AMIR	L	7317191502780001	DS. KALADI DARUSSALAM
125	AMAR ARIFIN	L	7317192110970001	DS. KALADI DARUSSALAM
126	MIRHAN	L	7317190207920001	DS. KALADI DARUSSALAM
127	LAMUSTAN	L	7317190107950018	DS. KALADI DARUSSALAM
128	ANITA,S.IP	P	7604016509920002	DS. KALADI DARUSSALAM
129	TAHUDDIN BIN DAWANG	L	7317190107770019	DS. KALADI DARUSSALAM
130	LABABA BIN KULASSE	L	7317191810670001	DS. KALADI DARUSSALAM
131	MANGU	L	7317190102550001	DS. KALADI DARUSSALAM
132	ADI TAHIR	L	7317191107790002	DS. KALADI DARUSSALAM
133	HEMMA	L	7308130501600001	DS. KALADI DARUSSALAM
134	RUSMAN	L	7317190407720001	DS. KALADI DARUSSALAM
135	JUMARDIN	L	7317192103690001	DS. KALADI DARUSSALAM
136	MARDING	L	7317191007660001	DS. KALADI DARUSSALAM
137	MASRI	L	7317190506620002	DS. KALADI DARUSSALAM
138	AMI	L	7317191106900001	DS. KALADI DARUSSALAM
139	KAHARUDDIN	L	7317191217250001	DS. KALADI DARUSSALAM
140	JUPRI	L	7317190104620001	DS. KALADI DARUSSALAM
141	SUPARDI	L	7317194510700002	DS. KALADI DARUSSALAM
142	TAHANG	L	7317190205680002	DS. KALADI DARUSSALAM
143	AKBAR	L	7317192202860001	DS. KALADI DARUSSALAM
144	ASIS	L	7317193112760003	DS. KALADI DARUSSALAM

145. BASRI...

- 9 -

145	BASRI	L	7317193112630001	DS. KALADI DARUSSALAM
146	DUMARE	L	7317193112640007	DS. KALADI DARUSSALAM
147	MARDAYA	P	7317191212600001	DS. KALADI DARUSSALAM
148	MUSTAPA	L	7317190107670006	DS. KALADI DARUSSALAM
149	SALAMA	L	7317190411770001	DS. KALADI DARUSSALAM
150	RUSLI	L	7306031805880002	DS. KALADI DARUSSALAM
151	YUDIN	L	7317190108840001	DS. KALADI DARUSSALAM
152	IBE	L	7317190512700001	DS. KALADI DARUSSALAM
153	BADU	L	7317191404630001	DS. KALADI DARUSSALAM
154	ABU	L	7317190107910006	DS. KALADI DARUSSALAM
155	KINAS	L	7317190107720006	DS. KALADI DARUSSALAM
156	BIDE	L	7317193112860011	DS. KALADI DARUSSALAM
157	SUKARDI	L	7317192008740002	DS. KALADI DARUSSALAM
158	SAHRI	L	7317191307800001	DS. KALADI DARUSSALAM
159	AKIS	L	7317193112810008	DS. KALADI DARUSSALAM
160	ASSE S	L	7317190407790001	DS. KALADI DARUSSALAM
161	BOMBONG	P	7317194107620007	DS. KALADI DARUSSALAM
162	ANSAR	L	7317190301890001	DS. KALADI DARUSSALAM
163	ASMA	P	7317194107950005	DS. KALADI DARUSSALAM
164	WANDI	L	7317191119940002	DS. KALADI DARUSSALAM
165	KASMAN	L	7317190111000002	DS. KALADI DARUSSALAM
166	JUMARDIN	L	7317192103690001	DS. KALADI DARUSSALAM
167	MUHAMMAD SALEH	L	7313072103910002	DS. KALADI DARUSSALAM
168	AMIR J	L	7317191501690001	DS. KALADI DARUSSALAM
169	ANDI DUNGA	L	7317192004060001	DS. KALADI DARUSSALAM
170	TAMRIN	L	7317191706780001	DS. KALADI DARUSSALAM
171	BAHARUDDI.B	L	7317190511750001	DS. KALADI DARUSSALAM
172	A.SYAMSU	L	7317192105790001	DS. KALADI DARUSSALAM
173	RUMPA	L	7317192005400001	DS. KALADI DARUSSALAM
174	JAMUDDIN	L	7317193112620019	DS. KALADI DARUSSALAM
175	MURSALIM	L	7317190709670001	DS. KALADI DARUSSALAM
176	TAWISE	L	7317192011690001	DS. KALADI DARUSSALAM
177	RAHMAWATI	P	7317197012750001	DS. KALADI DARUSSALAM
178	ASHE ABU	L	7317193112690003	DS. KALADI DARUSSALAM
179	TAHAR	L	7317193112770014	DS. KALADI DARUSSALAM
180	BENNU	L	7317193112670002	DS. KALADI DARUSSALAM
181	ASRIL	L	7317192712820001	DS. KALADI DARUSSALAM
182	SAMI	L	7317191107690001	DS. KALADI DARUSSALAM
183	HERIYANTO	L	7317122006950001	DOKE-DOKE
184	JAMAL	L	7317192110760001	DSN LEMPO
185	WARSITO	L	7317193012720001	MAMARA
186	BAKRI D	L	7317190705600001	MAMARA
187	FIRMAN	L	1404051207720003	MAMARA
188	SIDING	L	7317193112740012	MAMARA
189	ALI ANSAR	L	7317190201930001	MAMARA
190	MANSUR YONO	L	7317190905850001	MAMARA
191	SANDI	L	7317190404890002	MAMARA
192	SAYU	L	7317192004860001	MAMARA
193	MUH.IRSYAD	L	7317192512880002	MAMARA
194	JOKO SUPRIANTO	L	7317190607820001	MAMARA
195	MUSMULIADI	L	7317190112900002	MAMARA
196	GAFIR	L	7317193112720011	MAMARA
197	JAINUDDIN	L	7317033112790029	MAMARA

198. YULIANTI...



- 10 -

198	YULIANTI	P	7317194102740001	MAMARA
199	DAHING	L	7317191205520001	MAMARA
200	LAODE RIDZUAN	L	7317191009690001	MAMARA
201	ANWAR	L	7317190708610001	MAMARA
202	BAKRI MADDA	L	7317192107650001	MAMARA
203	JABBAR	L	7317193112700013	MAMARA
204	SUPRIADI	L	7317193112760004	MAMARA
205	ROY	L	7317193112730010	MAMARA
206	RUTI	L	7317190102730002	MAMARA
207	SUDIN	L	7317192007800004	DUSUN PANGI
208	ISMAIL	L	7317190509920001	DUSUN BATU KOKO
209	SUMARDI	L	7317190102830002	LINDAJANG
210	MAHMUDDIN	L	7317201309890001	DSN.TAKKUN
211	YOGI	L	7317191509990001	LINDAJANG
212	SUDI	L	7317193112820016	DSN. DANDAI
213	MANSUR	L	7317191708920002	MUHAJIRIN
214	HASBI	L	7317191012800002	DSN.SALUBANGA
215	SUNARDI	L	7317141410830002	DSN.KULISOK
216	SULAEMAN	L	7317190301560001	DSN.SALUBUA
217	AMBO TANG	L	7317023112770026	TONDONGAN
218	SUDIRMAN	L	7317101212790004	DUSUN PUNCAMA
219	ABD.RAHMAN	L	7317192804850001	DUSUN PANGI
220	HASBI	L	7317191908640001	KAILI
221	MUHAJIR RAJAP	L	7317190107730013	DUSUN PANGI
222	JADDAR SODDING	L	7317192308770002	DUSUN PANGI
223	HALIN	L	7317190410770001	DUSUN PANGI
224	RIDWAN	L	7317192702810001	DUSUN MARA
225	MUHAMMAD.ASTAR	L	7322013105970001	DUSUN PANGI
226	SAHARUDDIN J	L	7317191592980001	DUSUN PANGI
227	ISLAMUDDIN	L	7317190910900001	DUSUN SALUSURE
228	YUSRI	L	7317030703660001	DURIAN
229	JAENAL	L	7317190511880001	DUSUN PANGI
230	NAIM	L	7317190705800001	KAILI
231	ISRAN L	L	7317192004850002	DUSUN PANGI
232	CACANG	L	7317190111850002	DUSUN PANGI
233	DARWIS	L	7317193108510001	DUSUN PANGI
234	KAHARUDDIN	L	7208131804800001	KAMBALU
235	ADRIANTO	L	7317930608020001	PADANG LAMBE
236	MUHAMMAD AMIRUDDIN	L	6403050805790002	BTN.BELOPA PERMAI BI/NO.6
237	INDRA JAYA	L	7317141406920001	DUSUN POLISOK
238	JUMADI	L	7317190202720001	DUSUN SALUBUA
239	RUDI FADLY	L	7317192006840001	DANDAI
240	DINISYAH	L	7317031506830002	JL.PEMUDA
241	ABD.KADIR	L	7317031012770002	JL.PEMUDA LINGK.SULI KOTA
242	RAHMAN	L	7317103112830032	DUSUN BATARI
243	SYAHRIR	L	7317190307860001	MUHAJIRIN
244	ANSAR. P	L	7317030205710002	LING.SULI KOTA
245	MUH.ASWAN	L	7317190611960001	LINDAJANG
246	HADO	P	7317194704540002	DUSUN DANDAI
247	IRWAN	L	7317193112770005	MAMARA
248	BACO H	L	7317190107500015	MUHAJIRIN
249	IMAM WAHYU	L	7317042205820001	DSN.LEMPANGAN

250. MUH...

- 11 -

250	MUH.YUSUF	L	7317190305940001	DUSUN BATU KOKO
251	KULIA	L	7317190807720001	DSN.SALUBUA
252	SIBU	L	7317031101620001	DSN.TIROWALI
253	ANDIKA CIPTO	L	7317022409830001	LING.CAPPIE
254	HERIATI	P	7317196306730001	LINDAJANG
255	SAHARUDDIN	L	7317190101720002	DUSUN MURANTE UTARA
256	MANSYUR	L	7317190507720001	MAMARA
257	ABDUL RAHMAN	L	7317031006760002	LING.SULI KOTA
258	KAMARUDDING	L	7317190202780001	DANDAI
259	LASILE	L	7317191104570001	DANDAI
260	SUDIRMAN	L	7317193112710006	DSN.LEMPO
261	IDRIS	L	7317191001620001	DUSUN LEMPO
262	ARE	L	7317193112770013	DANDAI
263	KADANG	L	7317190201830001	DSN.PANGI
264	AMIEN	L	7317190605750001	DUSUN SALUBUA
265	BEDDU LM	L	7317190101570001	LINDAJANG
266	HAMZAH	L	7317190403730001	DSN.SALUBUA
267	BASIR	L	7317190707700001	DUSUN BATU KOKO
268	THAMRIN EDHY	L	7317030107710020	DSN.LARANDU
269	BISRUM	L	7317030804780001	DUSUN BUNTU KUNYI
270	SURIANTO	L	7317191512930001	DSN.LEMPO
271	BAKRI	L	7317190102800002	DANDAI
272	SAINUDDIN	L	7317191707710001	KAILI
273	H.MANNA HUSE	L	7317023112540039	DUSUN BUNTU SAWAH
274	NAWIR	L	7317192209820001	KAILI
275	KAMALUDDIN	L	7317190707750001	DSN.PANGI
276	DOHIR	L	7317072110770001	JL.PELABUHAN ULO-ULO
277	MUH.ZAID	L	7317190909950003	MUHAJIRIN
278	HANATI	P	7317197112650005	DSN.SALUBUA
279	BURHAN	L	7317193112740016	MUHAJIRIN
280	ISHARIANTO	L	7317191304820001	MAMARA
281	SUPIRMAN	L	7317190703840001	DSN.PANGI
282	NURDIN	L	7317193009800001	DSN.SALUDIDI
283	SULFAWAN JAFAR	L	7317192312850001	MUHAJIRIN
284	ISMAL	L	7317193112600018	KAILI
285	ST.HANI	P	7317197012570003	BUNTU TANGKE
286	HUSEN	L	7317020907630001	DUSUN KANDONGAN
287	SATRIANI	P	7317036008770001	MALELA
288	MARDIN BSO	L	7317193112580007	DSN SALUBUA
289	MANSUR	L	7317101112900001	BENTENG
290	SUKRIADI	L	7317021803910002	BALEDO
291	SAKKA	L	7317192107770001	DUSUN BOTTORIU
292	IDRUS	L	7317190610790001	DANDAI
293	M.ALWI T.	L	7317193107450001	PANGI DESA PORINGAN
294	SAHAR	L	7317193112730016	DSN BUNTU
295	SULPI	L	7317193112790005	DSN.SALUBUA
296	ERLIAWATI SALATA	P	7317031707870002	JL.PEMUDA
297	FITRIANI BURHAN	P	7317195003910001	DANDAI
298	LILI SUMIATI	P	7317196105780001	DANDAI
299	NASIRA	P	7317197112680008	DANDAI
300	SULMAN	L	7317191109860001	SALUBUA
301	MAS'UD	L	7317142804850001	LEBANI
302	IBRAHIM	L	7317190107360001	LINDAJANG
303	IDAWATI	P	7317197005820001	DANDAI

304. LINUS...



- 12 -

304	LINUS	L	7317191103650001	MUHAJIRIN
305	YUYUN	L	7317193003920003	LINDAJANG
306	IRWAN	L	7317193112770011	DSN.SALUBUA
307	JASMAWATI	P	7317194202850001	MUHAJIRIN
308	JABBAR	L	7317190206750001	DSN.PANGI
309	JAMAL	L	7317192110760002	DSN.LEMPO
310	DJUHARIAH	P	7317037112590004	LINGK.BANAWA
311	SYAHRUM	L	7317031808780001	LINGK.SULI KOTA
312	FIRMAN	L	7313140803930001	DUSUN BULU CENGGE
313	AMIRUDDIN	L	7317193112430003	DANDAI
314	ASDIL	L	7317141203770001	LAMUNRE II
315	TENGGE	L	7317033112680038	JL.PEMUDA
316	ARPATI	P	7317196604810001	MAMARA
317	SYAMSUDDIN AMRU	L	7317143112390008	BELOPA UTARA
318	KADIR	L	7317191704750001	MAMARA
319	MUH.NUR	L	7317193112540001	MAMARA
320	ISKANDAR	L	7317191010840001	MUHAJIRIN
321	IHWAN	L	7317140104790001	SEPPONG UTARA
322	DARMINING	L	7317190107810009	MAMARA
323	SABRI	L	7317142410880001	LEBANI
324	JUHANIS	L	7317143112450014	LEBANI
325	HASAN	L	7317141104770001	LEBANI
326	LODDE	L	7317190102700002	SALUBUA
327	BAHAR	L	7317192105980002	DS. KALADI DARUSSALAM
328	HASANUDDIN	L	7317193012870007	DS. KALADI DARUSSALAM
329	BASINAR	L	7317191312790001	DS. KALADI DARUSSALAM
330	HERAWATI	P	7313146404940002	DS. KALADI DARUSSALAM
331	HABIBI	L	7317190709870001	DS. KALADI DARUSSALAM
332	TAKDIR	L	7317140112850001	DS. SALUBUA
333	MUZAKKAR	L	7317192012890001	DS. SALUBUA

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001